

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kabupaten Semarang

Halaman 4

DPRD Rekomendasikan BKK Susukan Diaudit

UNGERAN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang merekomendasikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Susukan untuk dilakukan audit investigasi menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang profesional dan independen.

Selain itu, bagi karyawan yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya agar diberi sanksi sampai dengan diberhentikan.

"Selain audit investigasi dan pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar, Banggar DPRD juga merekomendasikan agar SDM (karyawan) yang ada dievaluasi dan tidak merekrut karyawan baru. Kalau ada karyawan tidak mampu, tidak sesuai disiplin ilmunya, melanggar kinerja atau tanggung jawabnya ya diberhentikan. "Jangan melihat 'bawaannya' (titipan) siapa," tandas Ketua Banggar DPRD, Bambang Kusriyanto yang akrab disapa Krebo, Minggu (18/3).

Menurut Krebo, lembaga perbankan harus sehat agar bisa berjalan dengan baik. Sehingga perlu diambil langkah-langkah seperti yang direkomendasikan Banggar DPRD saat audiensi dengan Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas BKK Susukan, Jumat (18/3) lalu. "Diharapkan peran dewan pengawas untuk menjaga agar kondisi BKK Susukan sehat.

Anggota Banggar DPRD, Said Riswanto meminta Dirut BKK

Susukan yang baru menjalankan regulasi pengelolaan perusahaan daerah secara baik. "Selama ini kami melihat belum ada evaluasi, panisment maupun reward terhadap karyawan. "Ini yang harus dilakukan Dirutbaru, agar manajemen pengelolaan BKK Susukan lebih profesional," tandasnya.

Said mengungkapkan pengalamannya saat bekerja di perusahaan swasta jika melakukan kesalahan ada panisment mulai surat peringatan 1 sampai dikeluarkan. Misalnya di bagian marketing tak memenuhi target juga dikeluarkan.

"Pengelolaan manajemen secara profesional saat ini menjadi tuntutan. "Itu berlaku di perusahaan mana pun, termasuk perbankan, agar bisa bersaing dengan perbankan lainnya," tegasnya.

■ Upaya Preeventif

Menurut Said, audit investigasi dari lembaga independen dan profesional perlu dilakukan.

Sebab selama ini DPRD merasa hasil pemeriksaan keuangan secara internal yang sifatnya regulasi belum menampilkan substansi atau kondisi sebenarnya. "Jadi sekadar formalitas, kita ingin DPRD punya opini atau hasil audit KAP lain yang dipercaya independensinya. Itu tidak hanya berlaku di BKK Susukan saja, tapi juga BKK Ungaran, PDAM, serta BLUD RSUD Ungaran dan Ambarawa," ungkapnya.

Kata Said, anggaran untuk membayar KAP bisa di legislatif atau di eksekutif lewat inspektorat. Jika Inspektorat tak mau, anggarannya bisa dititipkan di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau ada audit dari KAP independen kita tahu kondisinya, karena DPRD tidak punya kemampuan seperti KAP. Ini upaya preeventif dari pengawasan DPRD, agar kesalahan sekecil mungkin bisa diketahui dan diantisipasi," ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengawas BKK Susukan yang juga pejabat penugasan khusus gubernur bidang komunikasi dan publikasi Pemprov Jateng, Agus Utomo menyatakan, sepakat dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang untuk memperbaiki BKK Susukan. "Prinsipnya kita sepakat. Saya dengan Dirut baru akan rumuskan bentuk evaluasi kinerja karyawan yang pas seperti apa, saya juga sudah menyetujui dilakukan audit investigasi," katanya sembari menyampaikan kunci maju mundurnya perusahaan profit yang dikejar target pendapatan adalah SDM.

Menurut Agus, seluruh BUMD di Jawa Tengah sedang didorong untuk meningkatkan kinerja dan target pencapaian pendapatan. "Saat ini provinsi sedang menyusun standar good corporate governance. Itu nanti rinci, tugasnya lebih tajam termasuk Dirut dan pengawas," jelasnya. ■

rbd/SR